



KEMENTERIAN DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL KESATUAN BANGSA DAN POLITIK

Jl. Medan Merdeka Utara No. 7 Jakarta Pusat 10110, Telp. (021) 345 2456

SURAT KETERANGAN TERDAFTAR

Nomor : 246 /D.III. 4 /III/2011

Memperhatikan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1985 tentang Organisasi Kemasyarakatan; Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 1986; Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor : 5 Tahun 1986; dan Surat Permohonan Pimpinan Pusat Keluarga Besar Putra Putri Polri (KBPPP) Nomor 09/PP-KBPPP/II/2011 tanggal 23 Februari 2011, setelah diadakan penelitian kelengkapan administrasi organisasi, dengan ini Direktorat Jenderal Kesatuan Bangsa dan Politik Kementerian Dalam Negeri, menyatakan bahwa :

Nama Organisasi : **KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI (KBPPP)**
Sifat Kekhususan : **KESAMAAN KEGIATAN**
NPWP : **02.184.507.8-019.000**
Periode Kepengurusan : **2010 - 2014**
Ketua : **KARTIKA HARIA AGENANDA**
Sekretaris : **AGUNG PUTU NGURAH.W.**
Bendahara : **SOVANA PURNAMA**
Alamat : Gedung YBB POLRI Pusat Lantai 4, Jl Darmawangsa I/1 Kel. Pulo Kec. Kebayoran Baru Jakarta Selatan
Telp/Fax : (021) 7394241/7394228

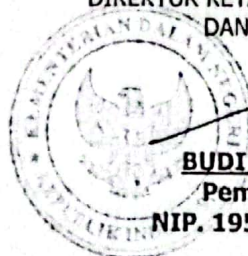
Telah terdaftar sebagai Organisasi Kemasyarakatan dan dalam melaksanakan kegiatannya agar tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Surat Keterangan ini berlaku sampai dengan tahun **2014** bila di kemudian hari Surat Keterangan Terdaftar ini terdapat kekeliruan dan/atau terjadi penyalahgunaan, akan ditinjau kembali sesuai ketentuan yang berlaku.

Demikian Surat Keterangan ini diberikan agar dipergunakan sebagaimana mestinya.

Jakarta, 22 Maret 2011

a.n. DIREKTUR JENDERAL
KESATUAN BANGSA DAN POLITIK
DIREKTUR KETAHANAN SENI, BUDAYA, AGAMA
DAN KEMASYARAKATAN,



BUDI PRASETYO, SH,MM

Pembina Utama Muda

NIP. 19570108 198703 1 001

Tembusan disampaikan kepada Yth :

1. Dirjen Kesbangpol, Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia (sebagai laporan);
2. Jaksa Agung Muda Bidang Inteljen Kejaksaan Agung Republik Indonesia;
3. Kepala BAINTEKAM Kepolisian Negara Republik Indonesia;
4. Dirjen Pajak, Kementerian Keuangan Republik Indonesia.



**KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043031.AH.01.07.TAHUN 2016
TENTANG
PENGESEHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI**

- Menimbang** :
- a Bahwa berdasarkan Permohonan Notaris MUHAMMAD YUHENDAR, SH , sesuai salinan Akta Nomor 25 Tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh MUHAMMAD YUHENDAR, SH tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI disingkat KBPP POLRI tanggal 31 Maret 2016 dengan Nomor Pendaftaran 60160331311016039 telah sesuai dengan persyaratan pengesahan Badan Hukum Perkumpulan;
 - b Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia tentang Pengesahan Badan Hukum Perkumpulan KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI disingkat KBPP POLRI;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KESATU** : Memberikan pengesahan badan hukum:
PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI disingkat KBPP POLRI
Berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN, sesuai salinan Akta Nomor 25 Tanggal 24 November 2015 yang dibuat oleh MUHAMMAD YUHENDAR, SH yang berkedudukan di KOTA ADMINISTRASI JAKARTA TIMUR.
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 07 April 2016



**LAMPIRAN KEPUTUSAN MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA
NOMOR AHU-0043031.AH.01.07.TAHUN 2016**

**TENTANG
PENGESAHAN PENDIRIAN BADAN HUKUM
PERKUMPULAN KELUARGA BESAR PUTRA PUTRI POLRI**

1. Susunan Organ Perkumpulan

NAMA	NO KTP/PASSPORT	ORGAN PERKUMPULAN	JABATAN
ABDUL HAMID BIMO SURYONO, SE, SH	3174040203670006	PENGURUS	KETUA UMUM
PAUL ALEXANDER OROH, SH	3171071111580005	PENGURUS	SEKRETARIS JENDERAL
RINO KUNARTO	3175100205680003	PENGURUS	BENDAHARA UMUM
DRS. SUNARKO	3174081605530002	PENGAWAS	KETUA

Ditetapkan di Jakarta, Tanggal 07 April 2016.

a.n MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL ADMINISTRASI HUKUM UMUM,



Dr. FREDDY HARRIS, S.H., L.L.M., ACCS

DICETAK PADA TANGGAL 07 April 2016